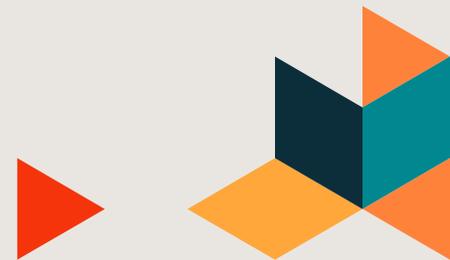




PEMUTAKHIRAN DATA KEPEGAWAIAN 2025

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

27 MEI 2025





AGENDA

- 01 Definisi PDK
- 02 Dasar Hukum dan Latar Belakang PDK
- 03 Tujuan dan Manfaat PDK
- 04 Hasil PDK 2 Tahun Sebelumnya
- 05 Rencana Jenis dan Validasi Data PDK
- 06 Rencana Monitoring dan Evaluasi PDK
- 07 Sanksi PDK



Definisi PDK

Pemutakhiran Data Kepegawaian (PDK) adalah proses peremajaan dan pembaharuan data yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, lengkap, dan terkini.

Dalam proses PDK, pemutakhiran dilakukan pegawai pada pelaksana BPK melalui aplikasi SISDM dengan disertai dokumen pendukungnya





Dasar Hukum dan Latar Belakang



Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 2/SE/X-XIII.2/6/2022 tentang Implementasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM) Versi 3 untuk menjaga keakuratan, kelengkapan, dan kemutakhiran data pegawai di lingkungan pelaksana BPK



Arahan dari pimpinan BPK terkait dengan pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian setiap tahun





TUJUAN



Menjaga keakuratan, kelengkapan, dan kemutakhiran data pegawai di lingkungan pelaksana BPK



Mendukung program pemerintah dalam integrasi data dan Indonesia Satu Data



Meningkatkan kualitas layanan kepegawaian





MANFAAT



- ❖ Meningkatkan kepedulian pegawai pada pelaksana BPK atas data kepegawaiannya
- ❖ Sebagai backup data pegawai apabila diperlukan dalam keadaan mendesak.
- ❖ Mempermudah dalam urusan administrasi kepegawaian baik internal maupun ekseternal
- ❖ Data pegawai lengkap dan mutakhir sehingga dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan kebijakan oleh pimpinan
- ❖ Peningkatan nilai IPASN
- ❖ Mendukung percepatan proses pelayanan kepegawaian, seperti kenaikan pangkat, SKP, Kesehatan, dll.





Hasil PDK 2023

Jumlah Pegawai Tidak Selesai PDK 2023 sebanyak **2 orang**, dan dikenakan sanksi pemotongan tunjangan kinerja.



Tingkat Penyelesaian PDK 2023 adalah **99,98%**

Jumlah Pegawai PDK 2023 sebanyak **9808** orang

Jumlah Pegawai Selesai PDK 2023 sebanyak **9806** orang





Hasil PDK 2024

Jumlah Pegawai Tidak Selesai PDK 2024 sebanyak **1orang**, dan dikenakan sanksi penahanan tunjangan kinerja.

Jumlah Pegawai Selesai PDK 2024 sebanyak **9776** orang



Tingkat Penyelesaian PDK 2024 adalah **99,99%**

Jumlah Pegawai PDK 2024 sebanyak **9777** orang





Rencana Jenis PDK

- Informasi Pegawai
- NIK dan NPWP
- Foto Pegawai per 1 Desember 2024
- Riwayat SPT, Riwayat LHKPN
- Riwayat Pendidikan Formal, Dinas, TPA dan Bahasa
- Riwayat Sertifikasi, Mengajar Formal, Dinas dan Seminar
- Riwayat Penghargaan, Prestasi dan Organisasi
- Riwayat Tempat Tinggal, Asuransi, Rekening, dan Ciri Fisik
- **Riwayat KP4 (Keluarga)**
- **Ukuran Seragam Dinas**





Validasi Data PDK



Validasi dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian data dengan bukti pendukungnya



Validasi dilakukan oleh pengelola kepegawaian dan pemilik proses bisnis



Update data tanpa melampirkan bukti pendukung dinyatakan tidak valid





Rencana Monev PDK

01

Proses **Monitoring dan Evaluasi** akan dilakukan per pekan setiap hari **Rabu**

02

Tim PDK Biro SDM akan mengirimkan rekapitulasi monev kegiatan PDK untuk dikonfirmasi kepada seluruh satker

03

Pengelola SDM Satker akan melakukan pengecekan atas hasil rekapitulasi monev dan menyampaikan hasil konfirmasi kepada **PIC satker** di Biro SDM



Sanksi PDK 2023



Pegawai yang tidak melakukan PDK pada batas waktu perpanjangan yang telah ditetapkan dari 28 September 2022 hingga 30 November 2023 diberikan sanksi

penahanan tunjangan kinerja dan telah disetor ke kas negara (2 Orang)



Sanksi PDK 2024



Pegawai yang tidak melakukan PDK pada batas waktu yang telah ditetapkan diberikan sanksi

penahanan tunjangan kinerja (1 Orang)



Sanksi PDK 2025





**TERIMA
KASIH**

